Dinas Komunikasi
Informatika dan Statistik
Kabupaten Brebes
Tahun 2023

PDRB

KABUPATEN BREBES TAHUN 2022

Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Brebes
Tahun 2022
Menurut Lapangan Usaha

KATA PENGANTAR

Publikasi **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Tahun 2022** merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes. Data PDRB yang digunakan pada buku ini adalah data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian Kabupaten Brebes secara deskriptif dalam periode lima tahunan. Dalam publikasi ini juga ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2018-2022 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 beserta tabel turunannya.

Kami menyadari bahwa terdapat kekurangan pada publikasi buku ini baik dari segi materi data maupun penyajian tabelnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan publikasi berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan data sehingga buku PDRB ini dapat dipublikasi. Akhirnya kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat, khususnya untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Brebes.

Brebes, Mei 2023

KEPALA DINKOMINFOTIK
KABUPATEN BREBES

TATAG KOES ADIANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199101 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ____ **i**

DAFTAR ISI ____ **ii**

DAFTAR TABEL ____ **v**

DAFTAR LAMPIRAN ____ **vi**

PENJELASAN TEKNIS ____ **vii**

BAB I PENJELASAN UMUM ____ **1**

1.1 Pengertian PDRB ____ **1**

1.2 Kegunaan PDRB ____ **2**

1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB ____ **2**

BAB II RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN ____ **6**

2.1 Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan ____ **6**

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. ____ 6

2.1.1 Perikanan ____ 9

2.2 Pertambangan dan Penggalian ____ **11**

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi ____ 11

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit ____ 12

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam ____ 12

2.3 Industri Pengolahan ____ **13**

2.3.1 Industri Pengolahan Batu Bara dan Pengilangan Migas ____ 13

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman ____ 14

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau ____ 14

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi ____ 14

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki ____ 15

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya ____ 15

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam 15

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisonal ____ 16

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik ____ 16

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam ____ 16

2.3.11 Industri Logam Dasar ____ 16

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik 17

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan ____ 17

2.3.14 Industri Alat Angkutan ____ 17

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas ____ **18**

2.4.1 Ketenagalistrikan ____ 19

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es ____ 19

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang ____ **20**

2.6 Konstruksi ____ **21**

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 22
2.7.1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya 23
2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor 23
2.8 Transportasi dan Pergudangan 24
2.8.1 Angkutan Rel 25
2.8.2 Angkutan Darat 25
2.8.3 Angkutan Laut 25
2.8.4 Sungai, Danau, dan Penyeberangan 26
2.8.5 Angkutan Udara 27
2.8.6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir 27
2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 28
2.9.1 Penyediaan Akomodasi 28
2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum 29
2.10 Informasi Dan Komunikasi 30
2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi 32
2.11.1 Jasa Perantara Keuangan 32
2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun 33
2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya 34
2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan 36
2.12 Real Estat 40
2.13 Jasa Perusahaan 40
2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 42
2.15 Jasa Pendidikan 43
2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 43
2.17 Jasa Lainnya 44
BAB III TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BREBES 48
3.1 PDRB Per Kapita 52
BAB IV PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PDRB KABUPATEBREBES MENURUT LAPANGAN USAHA 53
4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 53
4.2 Pertambangan dan Penggalian 54
4.3 Industri Pengolahan 55
4.4 Pengadaan Listrik dan Gas 56
4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 57
4.6 Konstruksi 57
***4.7* Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 57**
4.8 Transportasi dan Pergudangan 58
4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 59

4.10 Informasi dan Komunikasi 60
4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi 60
4.12 Real Estat 61
4.13 Jasa Perusahaan 61
4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 62
4.15 Jasa Pendidikan 62
4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 62
4.17 Jasa lainnya 63
LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022 _ 49

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2022 _____ 51

Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Brebes 2018-2022 _____ 52

Tabel 4. 1 Peranan Nilai Tambah Bruto (NTB) Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap NTB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen), 2018-2022_____ 54

Tabel 4. 2 Peranan NTB Subkategori Pertambangan dan Penggalian Terhadap NTB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2018-2022 _____ 55

Tabel 4. 3 Distribusi PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kategori C (Persen), 2018-2022 _____ 56

Tabel 4. 4 Peranan NTB Subkategori Pengadaan Listrik Terhadap NTB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2018-2022 _____ 57

Tabel 4. 5 Peranan NTB Subkategori Perdagangan Terhadap NTB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2018-2022_ 58

Tabel 4. 6 Peranan NTB Subkategori Transportasi Terhadap NTB Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2018-2022_____ 59

Tabel 4. 7 Peranan NTB Subkategori Penyediaan Akomodasi Terhadap NTB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2018- 2022 _____ 59

Tabel 4. 8 Peranan NTB Subkategori Jasa Keuangan Terhadap NTB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2018-2022_____ 61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022 _____ 65

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022 _____ 66

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022 67

Lampiran 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022 68

Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022 ___ 69

Lampiran 6 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022 _____ 70

Lampiran 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022 _____ 71

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan disini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha yang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut

dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

6. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa Yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap disatu tahun dasar.
8. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/ pergerakan yang terjadi.

Penjelasan Umum

1

1.1 Pengertian PDRB

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil- hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik pendapatan nasional/regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB ?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan PDRB

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara

1.3 Perubahan Tahun Dasar PDRB

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk modeling dan forecasting.

Mengapa tahun 2010 sebagai Tahun Dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks Harga Produsen *(Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja Tabel Persediaan dan Penggunaan (SUT) yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada Cultivated Biological Resources (CBR) merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum dipanen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.
- Metodologi: Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge* (IBSC) menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured* (FISIM).

- Valuasi: Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*) merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk. Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.
- Klasifikasi: Klasifikasi yang digunakan berdasarkan Internasional *Standard Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

2 Ruang Lingkup Dan Metode Penghitungan

Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing kategori dan subkategori lapangan usaha, cara-cara perhitungan Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan.

2.1.1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.

Golongan pokok ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa Pertanian dan perburuan hewan yang di tujukan untuk dijual.

2.1.1.1 Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.

Data produksi padi dan palawija diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes. Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Distribusi Hasil Survei Harga Perdesaan. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari dari Seksi

Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari dari Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Statistik Produksi.

2.1.1.2 Tanaman Hortikultura

Subkategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias.

Data produksi komoditas hortikultura diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Pertanian Hortikultura (SPH). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Pertanian Hortikultura (SPH) dan Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan BPS Kabupaten Brebes. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman hortikultura diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.3 Tanaman Perkebunan

Subkategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta).

Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-

lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.

Data produksi komoditas perkebunan diperoleh dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes. Data harga berupa harga produsen diperoleh Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan Kabupaten Brebes. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari hasil Survei Harga Perdesaan dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman perkebunan dari hasil Survei Harga Perdesaan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman perkebunan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.4 Peternakan

Subkategori Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. Subkategori ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dsb.

Data produksi komoditas peternakan diperoleh dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok peternakan dari hasil Survei Harga Perdesaan. Sedangkan data struktur biaya kegiatan peternakan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian.

2.1.1.5 Jasa Pertanian dan Perburuan

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang

khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan). Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut ditanggung oleh yang memberikan jasa.

Kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut.

Output jasa pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu. Output kegiatan pertanian diperoleh dari Seksi Statistik Produksi. Sedangkan proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output diperoleh dari hasil Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, dan Survei Perusahaan Peternakan yang dilakukan oleh BPS. Sedangkan untuk kegiatan perburuan dan pengkapan satwa liar diestimasi menggunakan pendapatan devisa dari penjualan satwa liar yang datanya diperoleh dari Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.1.1 Perikanan

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut

dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak.

Data produksi komoditas perikanan diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Tempat Pelelangan Ikan Triwulanan dan Dinas Perikanan (Dinkan). Data harga berupa harga produsen diperoleh dari Seksi Statistik Produksi BPS Kabupaten Brebes hasil Survei Tempat Pelelangan Ikan Triwulanan, Seksi Statistik Distribusi hasil Survei Harga Perdesaan dan Dinas Perikanan (Dinkan). Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang dibayar petani untuk biaya produksi kelompok perikanan dari Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS lewat BPS Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan data struktur biaya kegiatan perikanan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Perusahaan Perikanan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Perikanan BPS juga lewat BPS Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis, yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu, komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survei khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat penen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan *Cultivated Biological Resurces* (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen (*standing crops*) di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum

dipanen (*standing crops*) di awal periode yang disebut sebagai *Work-in-Progress* (WIP).

Sehingga total output pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, dan CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkapnya.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas harga dasar dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (*intermediate consumption*). Estimasi NTB atas dasar harga konstan 2010 menggunakan metode revaluasi, yaitu mengalikan produksi di tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar (tahun 2010) untuk mengestimasi output konstan tahun berjalan.

2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat golongan pokok, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalian lainnya.

2.2.1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

Sub kategori Pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan operasi dan/atau pengembangan lokasi penambangan minyak, gas alam, dan panas bumi.

Pendekatan penghitungan yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing periode penghitungan. Sedangkan NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi.

Data produksi untuk pertambangan migas diperoleh dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Data Harga/Indikator Harga juga diperoleh dari Ditjen

Migas, ESDM, Statistik PLN, dan Indeks Harga Produsen (IHP) Gas dan Panas Bumi sebagai penggerak harga gas alam dan panas bumi setiap triwulan; Data Struktur Biaya diperoleh dari Lap. Keuangan Perusahaan, BEI dan Statistik Pertambangan Migas BPS.

Data harga minyak mentah menggunakan *Indonesia Crude Price* (ICP), harga gas bumi pada tahun 2010 yang digerakkan berdasarkan IHP Gas dan Panas bumi. Harga uap panas bumi menggunakan harga panas bumi yang terdapat pada publikasi tahunan Statistik PLN dan digerakkan dengan IHP gas dan panas bumi untuk mendapatkan harga triwulanan.

2.2.2 Pertambangan Batubara dan Lignit

Pertambangan Batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencarian (*liquefaction*). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batubara dari kumpulan tepung bara.

Pertambangan Lignit mencakup penambangan di permukaan tanah termasuk penambangan dengan metode pencairan dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas dan memudahkan pengangkutan dan penyimpanan.

Untuk memperoleh output batubara dan lignit digunakan metode pendekatan produksi. NTB atas dasar harga konstan 2010 didapat dengan menggunakan cara yang sama seperti pada subsektor pertambangan migas yaitu revaluasi. Data produksi batubara dan lignit serta Harga Batubara Acuan (HBA) diperoleh dari Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM; Statistik Pertambangan Non Migas BPS serta beberapa data dari BPS Provinsi/Kabupaten/ Kotamadya; Dinas Pendapatan Daerah.

2.2.3 Pertambangan Bijih Logam

Sub kategori ini mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Termasuk bijih logam mulia lainnya. Kelompok bijih logam mulia lainya

mencakup pembersihan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara admi-nistratif dari usaha pertambangan bijih logam lainnya.

Beberapa jenis produknya, antara lain: pertambangan pasir besi dan bijih besi dan peningkatan mutu dan proses aglomerasi bijih mangaan, krom, nikel kobalt dan lain-lain; serta pertambangan bijih logam mulia, seperti emas, platina, perak dan logam mulia lainnya.

Penghitungan output bijih logam menggunakan metode pendekatan produksi dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan deflator Indeks Harga Produsen (IHP) tembaga dan emas.

2.3 Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.3.1 Industri Pengolahan Batu Bara dan Pengilangan Migas

Mencakup kegiatan perubahan minyak, gas bumi dan batubara menjadi produk yang bermanfaat seperti: pengilangan minyak dan gas bumi, di mana meliputi pemisahan minyak bumi menjadi produk komponen melalui teknis seperti pemecahan dan penyulingan. Produk khas yang dihasilkan: kokas, butane, propane, petrol, gas hidrokarbon dan metan, gasoline, minyak tanah, gas etane, propane dan butane sebagai produk penyulingan minyak. Termasuk disini adalah pengoperasian tungku batubara, produksi batubara dan semi batubara, gas batubara, ter, lignit dan kokas. KBLI 2009: kode 19.

2.3.2 Industri Makanan dan Minuman

Industri Makanan dan Minuman merupakan gabungan dari dua golongan pokok, yaitu Industri Makanan dan Industri Minuman. Industri makanan mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan. Industri minuman mencakup pembuatan minuman baik minuman beralkohol maupun tidak beralkohol, air minum mineral, bir dan anggur. dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran, minuman dengan bahan baku susu, dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. KBLI 2009: kode 10 dan 11.

2.3.3 Industri Pengolahan Tembakau

Pengolahan tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu, cangklong, snuff, *chewing* dan pemotongan serta pengeringan tembakau tetapi tidak mencakup penanaman atau pengolahan awal tembakau. Beberapa produk yang dihasilkan rokok dan cerutu, tembakau pipa, tembakau sedot (*snuff*), rokok kretek, rokok putih dan lain-lain. KBLI 2009: kode 12

2.3.4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

Sub kategori ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi. Industri tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian, pembuatan barang-barang tekstil bukan pakaian (seperti: sprei, taplak meja, gordein, selimut, permadani, tali temali, dan lain-lain). Industri pakaian jadi mencakup semua pekerjaan menjahit dari semua bahan dan semua jenis pakaian dan aksesoris, tidak ada perbedaan dalam pembuatan antara baju anak-anak dan orang dewasa, atau pakaian tradisional dan modern. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan industri bulu binatang (pakaian dari bulu binatang dan kulit yang berbulu). Contoh produk yang dihasilkan: kain tenun ikat, benang, kain, batik, rajutan, pakaian jadi sesuai pesananan dan lain-lain. KBLI 2009: kode 13 dan 14.

2.3.5 Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

Golongan pokok ini mencakup pengolahan dan pencelupan kulit berbulu dan proses perubahan dari kulit jangat menjadi kulit dengan proses penyamakan atau proses pengawetan dan pengeringan serta pengolahan kulit menjadi produk yang siap pakai, pembuatan koper, tas tangan dan sejenisnya, pakaian kuda dan peralatan kuda yang terbuat dari kulit, dan pembuatan alas kaki. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan produk sejenisnya dari bahan lain (kulit imitasi atau kulit tiruan), seperti alas kaki dari bahan karet, koper dari tekstil, dan lain-lain. KBLI 2009: kode 15.

2.3.6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya

Golongan pokok ini mencakup pembuatan barang-barang dari kayu. Kebanyakan digunakan untuk konstruksi dan juga mencakup berbagai proses pengerjaan dari penggergajian sampai pembentukan dan perakitan barang-barang dari kayu, dan dari perakitan sampai produk jadi seperti kontainer kayu. Terkecuali penggergajian, golongan pokok ini terbagi lagi sebagian besar didasarkan pada produk spesifik yang dihasilkan. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan meubeler, atau perakitan/pemasangan perabot kayu dan sejenisnya. Contohnya: pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso, papan, pengolahan rotan, kayu lapis, barang-barang bangunan dari kayu, kerajinan dari kayu, alat dapur dari kayu, rotan dan bambu. KBLI 2009: kode 16.

2.3.7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

Subsektor ini merupakan gabungan dari dua golongan pokok yaitu Industri Kertas dan Barang dari Kertas, dan Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Industri Kertas dan Barang dari Kertas mencakup pembuatan bubur kayu, kertas, dan produk kertas olahan Pembuatan dari produk-produk tersebut merupakan satu rangkaian dengan tiga kegiatan utama. Kegiatan pertama pembuatan bubur kertas, lalu yang kedua pembuatan kertas yang menjadi lembaran-lembaran dan yang ketiga barang dari kertas dengan berbagai tehnik pemotongan dan pembentukan, termasuk kegiatan pelapisan dan laminasi. Barang kertas dapat merupakan barang cetakan selagi pencetakan bukanlah merupakan hal yang utama.

Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman mencakup pencetakan barang-barang dan kegiatan pendukung yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan Industri Pencetakan;

2.3.8 Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisonal

Golongan pokok ini terdiri dari dua industri yaitu Industri Kimia dan Industri Farmasi dan Obat Tradisional. Industri Kimia mencakup perubahan bahan organik dan non organik mentah dengan proses kimia dan pembentukan produk. Ciri produk kimia dasar yaitu yang membentuk kelompok industri pertama dari hasil produk antara dan produk akhir yang dihasilkan melalui pengolahan lebih lanjut dari kimia dasar yang merupakan kelompok-kelompok industri lainnya. Industri Farmasi dan Obat Tradisional mencakup pembuatan produk farmasi dasar dan preparat farmasi. Golongan ini mencakup antara lain preparat darah, obat-obatan jadi, preparat diagnostik, preparat medis, obat tradisional atau jamu dan produk botanikal untuk keperluan farmasi. KBLI 2009: kode 20 dan 21.

2.3.9 Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

Golongan pokok ini mencakup pem-buatan barang plastik dan karet dengan penggunaan bahan baku karet dan plastik dalam proses pembuatannya. Misalnya; pembuatan karet alam, pembuatan ban karet untuk semua jenis kendaraan dan peralatan, pengolahan dasar plastik atau daur ulang. Namun demikian tidak berarti bahwa semua barang dari bahan baku karet dan plastik termasuk di golongan ini, misalnya industri alas kaki dari karet, industri lem, industri matras, industri permainan dari karet, termasuk kolam renang mainan anak-anak. KBLI 2009: kode 22.

2.3.10 Industri Barang Galian Bukan Logam

Kegiatan ini mencakup pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti gelas dan produk gelas, produk keramik dan tanah liat bakar, semen dan plester. Industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya juga termasuk di sini. KBLI 2009: kode 23.

2.3.11 Industri Logam Dasar

Golongan pokok ini mencakup kegiatan peleburan dan penyulingan baik logam yang mengandung besi maupun tidak dari bijih, potongan atau bungkahan dengan menggunakan bermacam teknik metalurgi.

Contoh produk: industri besi dan baja dasar, penggilingan baja, pipa, sambungan pipa dari baja, logam mulia, logam dasar bukan besi dan lain-lain. KBLI 2009 : kode 24.

2.3.12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

Golongan ini mencakup pembuatan produk logam "murni" (seperti suku cadang, container/wadah dan struktur), pada umumnya mempunyai fungsi statis atau tidak bergerak, pembuatan perlengkapan senjata dan amunisi, pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang-barang elektronik sejenis, termasuk pembuatan komponennya, pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. KBLI 2009: kode 25, 26 dan 27

2.3.13 Industri Mesin dan Perlengkapan

Kegiatan yang tercakup dalam golongan pokok Industri Mesin dan Perlengkapan adalah pembuatan mesin dan peralatan yang dapat bekerja bebas baik secara mekanik atau yang berhubungan dengan pengolahan bahan-bahan, termasuk komponen mekaniknya yang menghasilkan dan menggunakan tenaga dan komponen utama yang dihasilkan secara khusus.

Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan mesin untuk keperluan khusus untuk angkutan penumpang atau barang dalam dasar pembatasan, peralatan tangan, peralatan tetap atau bergerak tanpa memperhatikan apakah peralatan tersebut dibuat untuk keperluan industri, pekerjaan sipil, dan bangunan, pertanian dan rumah tangga. KBLI 2009: kode 28 .

2.3.14 Industri Alat Angkutan

Golongan pokok ini mencakup Industri kendaraan bermotor dan semi trailer serta Industri alat angkutan lainnya. Cakupan dari golongan ini adalah pembuatan kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang atau barang, alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa. Golongan ini juga mencakup pembuatan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, termasuk pembuatan trailer atau semi-trailer. KBLI 2009 : kode 29 dan 30.

Sedang dan indeks produksi Industri Mikro dan Kecil diperoleh dari Direktorat Statistik Industri, BPS; Data Harga/Indikator Harga diperoleh dari Direktorat Statistik Harga, BPS; Data Struktur Biaya diperkirakan dari Hasil Survei Tahunan IBS dan Hasil Survei Tahunan IMK, BPS ditambah dengan berbagai survei khusus yang dilakukan DNP BPS RI.

Pendekatan penghitungan untuk kegiatan Industri Pengolahan Migas menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku adalah merupakan perkalian antara produksi dengan harga untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga konstan digunakan cara revaluasi, yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar 2010. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun, sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih output atas dasar harga konstan dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan.

Pendekatan estimasi untuk Industri Batubara sampai dengan Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga konstan menggunakan pendekatan ekstrapolasi yaitu perkalian antara output tahun dasar dengan indeks produksi untuk masing-masing tahun, sedangkan output atas dasar harga berlaku dihitung dari output atas dasar harga konstan dikalikan indeks harga pada masing-masing tahun NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari selisih antara output atas dasar harga berlaku dengan konsumsi antara untuk masing-masing tahun,sedangkan untuk NTB atas dasar harga konstan diperoleh dari output atas dasar harga konstan dikurangi dengan konsumsi antara atas dasar harga konstan Dalam penghitungan NTB Industri pengolahan sub kategori ini, tabel SUT 2010 menjadi acuan sebagai tahun dasar 2010.

2.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori D mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan pendistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Kategori ini juga mencakup pengoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.4.1 Ketenagalistrikan

Golongan ini mencakup pembangkitan, pengiriman dan penyaluran tenaga listrik kepada konsumen, baik yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) maupun oleh perusahaan swasta (Non-PLN), seperti pembangkitan listrik oleh perusahaan milik Pemerintah Daerah, dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan) dengan tujuan untuk dijual. Listrik yang dibangkitkan atau diproduksi meliputi listrik yang dijual, dipakai sendiri, hilang dalam transmisi dan distribusi, dan listrik yang dicuri.

Metode penghitungan dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga dasar per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga dasar per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

2.4.2 Pengadaan Gas dan Produksi Es

Subkategori ini menghasilkan Gas Alam, Gas Buatan, Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es. Golongan ini mencakup pembuatan gas dan pendistribusian gas alam atau gas buatan ke konsumen melalui suatu sistem saluran pipa, dan kegiatan penjualan gas. Golongan ini juga mencakup penyediaan gas melalui berbagai proses, pengangkutan, pendistribusian dan penyediaan semua jenis bahan bakar gas, penjualan gas kepada konsumen melalui saluran pipa. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang mengurus perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pengubahan komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.

Kegiatan Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es mencakup kegiatan produksi, pengumpulan dan pendistribusian uap dan air panas untuk pemanas, energi dan tujuan lain, produksi dan distribusi pendinginan udara, pendinginan air untuk tujuan pendinginan dan produksi es, termasuk es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan.

Metode penghitungan seri 2010 dengan menggunakan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Sumber data produksi dan harga gas kota diperoleh dari PT PGN (Persero). Data produksi dilaporkan langsung oleh PT. PGN setiap tiga bulan. Sementara data harga dikutip dari laporan keuangan PT. PGN yang terbit setiap tiga bulanan. Untuk data harga, terdapat jeda satu triwulan sehingga harus diestimasi untuk triwulan terakhir.

2.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

Metode penghitungan Nilai Tambah Bruto untuk pengadaan air tahun dasar 2010 sama dengan seri 2000 dengan pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalui perkalian antara kuantum barang yang dihasilkan dengan harga per unit produksi pada masing-masing tahun. Dan untuk data harga yang tidak tersedia pada tahun terakhir diperkirakan dengan kenaikan laju IHK

komponen bahan bakar, penerangan dan air bersih. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2010. Selanjutnya untuk memperoleh NTB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 adalah dengan mengalikan output pada masing-masing tahun dengan rasio NTB.

Penghitungan pengelolaan sampah/limbah dengan pendekatan pendapatan. Dalam lembar kerja pengelolaan, pembuangan dan pembersihan sampah dilakukan oleh Pemerintah dan swasta. Kegiatan yang dilakukan pemerintah menggunakan APBN/APBD.

Sumber Data: untuk data Produksi adalah Subdit. Statistik Pertambangan dan Energi - BPS, APBD (Kemenkeu); data Output Sampah diperoleh dari Subdit. Statistik IBS - BPS; Data Harga diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS RI; Data Struktur Biaya diperoleh dari Hasil Survei Tahunan Air Bersih - BPS.

2.6 Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil. baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

Hasil kegiatan konstruksi antara lain: Konstruksi gedung tempat tinggal; Konstruksi gedung bukan tempat tinggal; Konstruksi bangunan sipil, misal: jalan, tol, jembatan, landasan pesawat terbang, jalan rel dan jembatan kereta api, terowongan, bendungan, waduk, menara air, jaringan irigasi, drainase, sanitasi, tanggul pengendali banjir, terminal, stasiun, parkir, dermaga, pergudangan, pelabuhan, bandara, dan sejenisnya; Konstruksi bangunan elektrik dan telekomunikasi: pembangkit tenaga listrik; transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi, dan sebagainya; Instalasi gedung dan bangunan sipil: instalasi listrik termasuk alat pendingin dan pemanas ruangan, instalasi gas, instalasi air bersih dan air limbah serta saluran drainase, dan sejenisnya;

Pengerukan: meliputi pengerukan sungai, rawa, danau dan alur pelayaran, kolam dan kanal pelabuhan baik bersifat pekerjaan ringan, sedang maupun berat; Penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, termasuk pembongkaran dan penghancuran gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya; Penyelesaian konstruksi sipil seperti pemasangan kaca dan aluminium; pengerjaan lantai, dinding dan plafon gedung; pengecatan; pengerjaan interior dan dekorasi dalam penyelesaian akhir; pengerjaan eksterior dan pertamanan pada gedung dan bangunan sipil lainnya; Penyewaan alat konstruksi dengan operatornya seperti derek lori, molen, buldoser, alat pencampur beton, mesin pancang, dan sejenisnya.

Metode yang digunakan untuk memperkirakan Ouput harga berlaku sektor konstruksi adalah metode ekstrapolasi dengan indeks konstruksi harga berlaku sebagai ekstrapolatornya. Untuk mendapatkan Output harga konstan, Output harga berlaku dideflasi dengan menggunakan IHPB konstruksi sebagai deflator. Sementara input antara didapat dengan menggunakan metode *commodity flow* beberapa komoditas utama dari input antara, misalnya produksi semen, kayu, juga bahan galian. NTB berlaku didapat dari nilai output berlaku dikurangi dengan biaya antara berlaku. Sementara NTB konstan didapat dari mengalikan output konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data indikator produksi kayu log, bambu dan produk industri bukan migas dari Subdirektorat Neraca Barang-BPS; produksi aspal dari Statistik Perminyakan Indonesia (SPI) Ditjen Migas-Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); ekspor semen dari Subdirektorat Statistik ekspor-BPS dan asosiasi semen Indonesia (ASI) impor semen dan bahan bangunan SITC 3 digit dari subdirektorat Statistik Impor-BPS. Indikator harga berupa IHPB bahan bangunan dari Subdirektorat Statistik Harga Perdagangan Besar-BPS. Indeks konstruksi dari publikasi Statistik Konstruksi, Subdirektorat Statistik Konstruksi-BPS.

2.7 Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar)

maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Penjualan tanpa perubahan teknis juga mengikutkan kegiatan yang terkait dengan perdagangan, seperti penyortiran, pemisahan kualitas dan penyusunan barang, pencampuran, pembotolan, pengepakan, pembongkaran dari ukuran besar dan pengepakan ulang menjadi ukuran yang lebih kecil, penggudangan, baik dengan pendingin maupun tidak, pembersihan dan pengeringan hasil pertanian, pemotongan lembaran kayu atau logam.

Pedagang besar seringkali secara fisik mengumpulkan, menyortir, dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan pedagang eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Pada umumnya pedagang pengecer memperoleh hak atas barang-barang yang dijualnya, tetapi beberapa pedagang pengecer bertindak sebagai agen, dan menjual atas dasar konsinyasi atau komisi.

2.7.1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya

Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesori mobil dan motor, juga mencakup kegiatan agen komisi yang terdapat dalam perdagangan besar dan eceran kendaraan.

2.7.2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

Sub kategori ini mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan

internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini.

Output lapangan usaha perdagangan adalah margin perdagangan, yaitu nilai jual dikurangi nilai beli barang yang diperdagangkan setelah dikurangi biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang. Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang "*commodity flow approach*". Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang domestik ditambah impor barang dari luar negeri. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan.

Sedangkan reparasi mobil dan sepeda motor dihitung dengan pendekatan produksi dengan indikator produksinya adalah jumlah kendaraan. Untuk mendapatkan nilai tambah konstannya, nilai tambah berlaku yang diperoleh di-deflate menggunakan IHK umum (BPS).

Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah data output barang dari industri domestik (dari Subdit Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang(BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi BPS RI.

2.8 Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.8.1 Angkutan Rel

Angkutan Rel untuk penumpang dan atau barang yang menggunakan jalan rel kereta melalui antar kota, dalam kota dan pengoperasian gerbong tidur atau gerbong makan kereta api yang sepenuhnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI).

Metode estimasi yang digunakan yaitu pendekatan produksi. Indikator produksi adalah jumlah penumpang dan barang yang diangkut atau jumlah km-penumpang dan km-ton barang. Output dan NTB atas dasar harga berlaku diolah dari laporan keuangan PT. KAI. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan rel dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan jumlah penumpang dan barang sebagai ekstrapolatornya. NTB atas dasar harga konstan 2010 diperoleh berdasarkan perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun 2010.

2.8.2 Angkutan Darat

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya, baik bermotor maupun tidak bermotor.Termasuk pula kegiatan *charter*/sewa kendaraan baik dengan atau tanpa pengemudi; serta jasa angkutan dengan saluran pipa untuk mengangkut minyak mentah, gas alam, produk minyak, kimia dan air.

Indikator produksi berupa jumlah kendaraan/ armada wajib uji (taksi, angkot, bis, dan truk) diperoleh dari Subdirektorat Info Lantas POLRI. Data untuk penghitungan struktur output dan rasio NTB diperoleh dari laporan keuangan PT Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD), PT Djawatan Angkoetan Motor RI (Perum DAMRI) dan beberapa perusahaan angkutan darat *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan data indikator harga menggunakan IHK jasa angkutan jalan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.3 Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal laut yang beroperasi di dalam dan ke luar daerah domestik. Tidak termasuk kegiatan pelayaran laut yang diusahakan oleh perusahaan lain yang berada dalam satu kesatuan usaha, di mana kegiatan

pelayaran ini sifatnya hanya menunjang kegiatan induknya dan data yang tersedia sulit untuk dipisahkan.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya.Output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode ekstrapolasi, yaitu indeks produksi jumlah penumpang dan indeks muat barang sebagai ekstrapolatornya. Sedangkan NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang dan rata-rata output per barang diperoleh dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dan PT Djakarta Lloyd, serta IHK jasa angkutan laut dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public* angkutan laut dari Bursa Efek Indonesia.

2.8.4 Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan yang dicakup meliputi kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kendaraan dengan menggunakan kapal/angkutan sungai dan danau baik bermotor maupun tidak bermotor, serta kegiatan penyeberangan dengan alat angkut kapal ferry.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi.Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut.Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harga yang terdiri dari angkutan sungai, danau serta penyeberangan. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi rata-rata tertimbang jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut. Selanjutnya, NTB diperoleh berdasarkan perkalian antara rasio NTB dengan outputnya.

Data indikator produksi berupa jumlah penumpang, barang dan kendaraan yang diangkut diperoleh dari publikasi tahunan Statistik Perhubungan, Kementrian Perhubungan. Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang, rata-rata output per barang dan rata-rata

output per kendaraan diperoleh dari PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, serta IHK jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS. Dalam penghitungan rasio NTB digunakan data laporan rugi/laba PT. ASDP Indonesia Ferry.

2.8.5 Angkutan Udara

Kegiatan ini meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan pesawat udara yang diusahakan oleh perusahaan penerbangan yang beroperasi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut, atau jumlah km-penumpang dan ton-km barang yang diangkut. Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian indikator produksi dengan indikator harganya untuk masing-masing angkutan penumpang dan barang baik domestik maupun internasional. Output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode ekstrapolasi, dan sebagai ekstrapolatornya adalah indeks produksi jumlah penumpang dan jumlah barang yang diangkut. Sedangkan NTB diperoleh dengan mengalikan rasio NTB dengan output untuk masing-masing harga. Data indikator produksi berupa jumlah penumpang naik dan barang yang diangkut diperoleh dari PT Angkasa Pura I (Kawasan Tengah dan Timur Indonesia) dan PT Angkasa Pura II (Kawasan Barat Indonesia). Sedangkan indikator harga berupa rata-rata output per penumpang/km-penumpang dan rata-rata output per barang/km-ton barang diperoleh dari laporan perusahaan penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia Airlines dan PT Merpati Nusantara Air-lines; serta IHK jasa angkutan udara dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.8.6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir

Mencakup kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, yaitu jasa-jasa pelabuhan udara, laut, sungai, darat (terminal & parkir), jasa pelayanan bongkar muat barang darat dan laut, keagenan penumpang, jasa ekspedisi, jalan tol, pergudangan, jasa pengujian kelayakan angkutan darat dan laut, jasa penunjang lainnya, pos dan jasa kurir.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Nilai output dan NTB atas dasar harga berlaku dari hasil pengolahan data pendapatan dan pengeluaran/biaya dari laporan rugi/laba perusahaan BUMN dan beberapa perusahaan *go public*.

Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan metode deflasi, yaitu dengan membagi nilai output atas dasar berlaku dengan indeks harga tahun dasar 2010. Nilai NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan jasa penunjang angkutan diperoleh dari badan usaha milik negara, seperti : PT Angkasa Pura I & II, PT Pelabuhan Indonesia I-IV, PT Jasa Marga, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara Reksa, PT PBM Adhiguna Putera, PT KBN, dan beberapa perusahaan *go public* dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan indikator harga berupa IHK sarana penunjang transpor dari Subdit Statistik Harga Konsumen, BPS.

2.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran.

2.9.1 Penyediaan Akomodasi

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan

makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan.

Nilai Tambah Bruto sub kategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Sedangkan NTB diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB. Output dan NTB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode revaluasi.

Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Subdit Statistik Pariwisata, BPS. Indikator harga menggunakan data tarif dari Survei Hotel Tahunan yang dilakukan oleh Subdit Statistik Pariwisata, BPS.

2.9.2 Penyediaan Makan dan Minum

Kegiatan sub kategori ini mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran self service atau restoran take away, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung outputnya yaitu melalui pendekatan produksi. Indikator produksinya berupa jumlah penduduk pertengahan tahun. Dan indikator harganya berupa pengeluaran rata-rata per kapita atas makan minum jadi di luar rumah. Hasil perkalian kedua indikator tersebut diperoleh output atas dasar harga berlaku. Sedangkan, output atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dengan IHK kelompok makanan jadi, minuman, dan rokok sebagai deflator. Dan NTB atas dasar harga berlaku maupun konstan diperoleh berdasarkan perkalian output dengan rasio NTB.

Data indikator produksi sub kategori penyediaan makan dan minum bersumber dari Proyeksi Penduduk Indonesia Sensus Penduduk 2010 - BPS. Sedangkan data indikator harga diperoleh dari hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (Susenas) dan IHK makanan jadi, minuman dan rokok dari publikasi Indikator Ekonomi - BPS.

2.10 Informasi Dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi. Kegiatan industri penerbitan mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik, penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti CD ROM buku referensi dan lain-lain).

Kegiatan industri produksi gambar bergerak, video, perekaman suara dan penerbitan musik ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini. Selain itu juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.

Kegiatan industri penyiaran dan pemrograman (radio dan televisi) ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV.

Kegiatan industri telekomunikasi ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa yaitu atau perolehan hak untuk menyalurkannya pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari

berbagai teknologi. Umumnya kegiatan ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya.

Kegiatan industri pemograman, konsultasi komputer dan teknologi informasi ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi. Output atas dasar harga berlaku didapat dari nilai produksi/pendapatan hasil olahan survei industri besar dan sedang, serta laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go public* bergerak di industri informasi dan telekomunikasi, sedangkan NTB atas dasar harga berlaku didapat dari penjumlahan upah dan gaji, laba/rugi, penyusutan, dan komponen-komponen lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan metode deflasi, dan NTB atas dasar harga konstan didapat dari perkalian antara output atas dasar harga konstan dengan rasio NTB tahun dasar 2010.

Sumber data utama untuk kegiatan informasi diperoleh dari Subdit Statistik Industri Besar dan Sedang dan Subdit Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi BPS RI, perusahaan *go public* dibidang televisi dan teknologi informasi, Direktorat perfilman Dirjen Ekraf Seni dan Budaya Kemenparekraf, sedangkan kegiatan telekomunikasi diperoleh dari perusahaan telekomunikasi *go public* seperti: PT Telkom dan anak perusahaannya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel); PT Indosat dan anak perusahaannya, Excel Axiata; PT. Bakrie Telecom; dan PT. Smartfren Telecom. Sedangkan indikator harga berupa indeks harga seperti: IHP percetakan dan penerbitan dari Subdit Statistik Harga Produsen-BPS; IHK umum dan IHK jasa komunikasi dari Subdit Statistik Harga Konsumen-BPS.

2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.11.1 Jasa Perantara Keuangan

Kegiatan yang dicakup didalam Jasa Perantara Keuangan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, memberikan kredit/pinjaman baik kredit jangka pendek/ menengah dan panjang. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok Jasa Perantara Keuangan sedangkan memberikan jasa lainnya hanya kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya. Kegiatan Jasa Perantara Keuangan tersebut antara lain bank sentral, perbankan konvensional maupun syariah, baik bank pemerintah pusat dan daerah, bank swasta nasional, bank campuran dan asing, dan bank perkreditan rakyat, juga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, baitul maal wantanwil dan jasa perantara moneter lainnya.

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk bank komersial (termasuk BPR) dan pendekatan pengeluaran untuk bank sentral (Bank Indonesia). Output atas dasar harga berlaku dari usaha bank komersial adalah jumlah penerimaan atas jasa pelayanan bank yang diberikan kepada pemakainya, seperti biaya administrasi atas transaksi dengan bank, dan imputas tidak mencakup pembuatan mebeler, atau jasa implisit bank yang diukur dengan menggunakan metode FISIM, juga pendapatan lainnya yang diperoleh karena melakukan kegiatan pendukung, seperti: mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga. Output bank sentral (Bank Indonesia) dihitung adalah jumlah atas biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk konsumsi antara, pengeluaran untuk upah/gaji pegawai, pajak, dan penyusutan.

Sedangkan output KSP, BMT dan Jasa Moneter lainnya diperoleh dengan mengalikan rata-rata pendapatan usaha dengan masing-masing jumlah usahanya. Penghitungan NTB atas dasar harga konstan 2010 dilakukan dengan menggunakan metode deflasi dan sebagai deflatornya adalah IHK Umum dan Indeks Implisit PDRB tanpa Jasa Perantara Keuangan. Data output dan NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia.

2.11.2 Asuransi dan Dana Pensiun

Asuransi dan dana pensiun mencakup penjaminan tunjangan hari tua serta polis asuransi, dimana premi tersebut diinvestasikan untuk digunakan terhadap klaim yang akan datang.

- **Asuransi dan Reasuransi**

Asuransi dan reasuransi adalah salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya menanggung resiko-resiko atas terjadinya musibah/kecelakaan terhadap barang atau orang, termasuk tunjangan hari tua. Pihak tertanggung dapat menerima biaya atas hancur/rusaknya barang atau karena terjadinya kematian pihak tertanggung. Golongan ini mencakup kegiatan asuransi jiwa, asuransi non jiwa dan reasuransi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan asuransi dan reasuransi merupakan penjumlahan dari hasil underwriting, hasil investasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan asuransi dan reasuransi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Dana Pensiun**

Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang

dibayarkan secara berkala atau sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pension. Dana pensiun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan dana pensiun merupakan hasil pengolahan laporan keuangan kegiatan tersebut. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan dana pensiun diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.3 Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya meliputi kegiatan jasa keuangan yang mencakup kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman. Subkategori ini mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pegadaian, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, modal ventura, anjak piutang, dan jasa keuangan lainnya.

- **Pegadaian**

Pegadaian mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan pegadaian merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Pegadaian yang terdiri dari pendapatan sewa modal, pendapatan administrasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Pegadaian, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Lembaga Pembiayaan**

Lembaga pembiayaan mencakup kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi, pembiayaan konsumen, pembiayaan kartu kredit, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan leasing lainnya. Sewa guna usaha dengan hak opsi mencakup kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk finance lease untuk digunakan oleh penyewa (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pembiayaan konsumen mencakup usaha pembiayaan melalui pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. Pembiayaan kartu kredit mencakup usaha pembiayaan dalam transaksi pembelian barang dan jasa para pemegang kartu kredit. Pembiayaan anjak piutang mencakup usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan piutang suatu perusahaan.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan lembaga pembiayaan merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan pembiayaan. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Modal Ventura**

Modal ventura mencakup kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan modal ventura. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan pegadaian diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.11.4 Jasa Penunjang Keuangan

Jasa penunjang keuangan meliputi kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Subkategori ini mencakup kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek), manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, wali amanat, jasa penukaran mata uang, jasa broker asuransi dan reasuransi, dan kegiatan penunjang jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun lainnya.

- **Administrasi Pasar Uang (Bursa Efek)**

Administrasi pasar uang (bursa efek) mencakup usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana perdagangan efek. Kegiatannya mencakup operasi dan pengawasan pasar uang, seperti bursa kontrak komoditas, bursa surat berharga, serta bursa saham.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) merupakan hasil pengolahan laporan keuangan PT Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari pendapatan jasa transaksi efek, jasa pencatatan, jasa informasi, dan pendapatan lainnya. Sedangkan output atas

dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan administrasi pasar uang (bursa efek) diperoleh dari PT BEI, dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Manager Investasi**

Manager investasi mencakup usaha mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan manager investasi.

Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan manager investasi diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Lembaga Kliring dan Penjaminan**

Lembaga kliring dan penjaminan mencakup usaha menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK)

umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga kliring dan penjaminan diperoleh dari PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (PT KPEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian mencakup usaha menyelenggarakan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain, serta penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian diperoleh dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI). Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Wali Amanat**

Wali amanat (*trustee*) mencakup kegiatan usaha pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan wali amanat. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai

deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan wali amanat diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Jasa Penukaran Mata Uang**

Jasa penukaran mata uang (money changer) mencakup usaha jasa penukaran berbagai jenis mata uang, termasuk pelayanan penjualan mata uang.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan laporan keuangan perusahaan jasa penukaran mata uang. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa penukaran mata uang diperoleh dari Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

- **Jasa Broker Asuransi dan Reasuransi**

Jasa broker asuransi dan reasuransi mencakup usaha yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai penanggung.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output dari kegiatan ini merupakan hasil pengolahan asuransi dan reasuransi. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode deflasi, dimana Indeks Harga Konsumen (IHK) umum digunakan sebagai deflator. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa laporan keuangan kegiatan jasa broker asuransi dan reasuransi diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Subdirektorat Statistik Keuangan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.12 Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedungm pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estate adalah properti berupa tanah dan bangunan.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan output usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per m2. NTB diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan outputnya. NTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode ekstrapolasi dan sebagai ekstrapolatornya indeks luas bangunan.

Sumber data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh berdasarkan hasil Susenas dan Sensus Penduduk, BPS (imputasi sewa rumah). Sedangkan data produksi usaha persewaan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil penelitian asosiasi. Struktur input pada usaha persewaan bangunan tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Khusus Sektor Perdagangan dan Jasa (SKSPJ), BPS.

2.13 Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk

pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

- **Jasa Hukum**

Jasa hukum mencakup usaha jasa pengacara/penasihat hukum, notaris, lembaga bantuan hukum, serta jasa hukum lainnya.

- **Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa**

Jasa akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan mencakup usaha jasa pembukuan, penyusunan, dan analisis laporan keuangan, persiapan atau pemeriksaan laporan keuangan dan pengujian laporan serta sertifikasi keakuratannya. Termasuk juga jasa konsultasi perpajakan.

- **Jasa Arsitek dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknis Lainnya**

Jasa arsitek dan teknik sipil serta konsultasi teknis mencakup usaha jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan *drafting*, jasa arsitektur perencanaan perkotaan, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi gedung atau bangunan.

- **Jasa Periklanan**

Jasa periklanan mencakup usaha jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Termasuk juga kegiatan menciptakan dan menempatkan iklan di surat kabar, majalah/tabloid, radio, televisi, internet, dan media lainnya.

- **Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil**

Jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil mencakup usaha jasa persewaan dan sewa guna usaha

tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya.

- **Jasa Penyaluran Tenaga Kerja**

Jasa penyaluran tenaga kerja mencakup usaha jasa penampungan dan penyaluran para tuna karya yang siap pakai, seperti agen penyalur jasa tenaga kerja Indonesia, agen penyalur pembantu rumah tangga, dan lainnya.

- **Jasa Kebersihan Umum Bangunan**

Jasa kebersihan umum bangunan mencakup usaha jasa kebersihan bermacam jenis gedung, seperti gedung perkantoran, pabrik, pertokoan, balai pertemuan, dan gedung sekolah.

Metode estimasi yang digunakan dalam menghitung output kategori jasa perusahaan atas dasar harga berlaku adalah pendekatan produksi. Output diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Sedangkan output atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan metode revaluasi. Nilai Tambah Bruto (NTB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diperoleh dari hasil perkalian output dan rasio NTB.

Sumber data berupa jumlah tenaga kerja diperoleh dari Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan BPS RI. Sedangkan untuk IHK umum diperoleh dari Subdirektorat Statistik Harga Konsumen BPS RI.

2.14 Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahnanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan social wajib. Kegiatan yang diklasifikasikan di kategori lain dalam KBLI tidak termasuk pada kategori ini., meskipun dilakukan oleh Badan pemerintahan. Sebagai contoh administrasi sistem sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk pada kategori ini, tetapi pengajaran itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit penjara atau militer diklasifikasikan pada kategori Q.

NTB administrasi pemerintahan atas dasar harga berlaku merupakan penjumlahan seluruh belanja pegawai dari kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan serta jasa pemerintahan lainnya ditambah dengan penyusutan. Perkiraan NTB atas dasar harga konstan 2010 dihitung dengan cara ekstrapolasi. Dan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sipil menurut golongan kepangkatan sebagai ekstrapolatornya.

Data bersumber dari Realisasi APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan; Realisasi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan; Statistik Keuangan Pemerintah daerah (K1, K2, K3), Badan Pusat Statistik; Realisasi APBD, Biro Keuangan Pemerintah Daerah;Jumlah pegawai negeri sipil, Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televise, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidiakn dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

Penghitungan NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, dan untuk Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan Pendekatan Produksi. Untuk NTB Jasa Pendidikan Pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan Pendekatan Deflasi, sedangkan Jasa Pendidikan Swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan; Kementerian Agama; Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan

lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

Metode penghitungan untuk jasa pemerintah atas dasar harga berlaku menggunakan pendekatan pengeluaran, sedangkan swasta menggunakan pendekatan produksi. NTB jasa kesehatan dan kegiatan sosial pemerintah atas dasar harga konstan 2010 menggunakan pendekatan deflasi, sedangkan jasa kesehatan dan kegiatan sosial swasta menggunakan pendekatan revaluasi.

Data diperoleh dari Realisasi APBN/APBD; Kementerian Kesehatan; Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); Berbagai Survei Khusus yang dilakukan DNP dan DNPeng BPS RI; Subdirektorat Statistik Harga Konsumen.

2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya merupakan gabungan 4 kategori pada KBLI 2009. Kategori ini mempunyai kegiatan yang cukup luas yang meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

- **Kesenian, Hiburan dan Rekreasi**

Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi berkategori R di dalam KBLI 2009. Kategori ini meliputi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum akan hiburan, kesenian, dan kreativitas, termasuk perpustakaan, arsip, museum, kegiatan kebudayaan lainnya, kegiatan perjudian dan pertaruhan, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. Output panggung hiburan/kesenian dihitung

berdasarkan pajak tontonan yang diterima pemerintah. Output untuk jasa hiburan dan rekreasi lainnya pada umumnya didasarkan pada hasil perkalian antara jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja masing-masing dengan rata-rata output per indikatornya. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi/ekstrapolasi dengan deflator/ ekstrapolatornya adalah IHK rekreasi dan olahraga/indeks indikator produksi yang sesuai.

Sumber data produksi Jasa Kesenian, Hiburan dan Rekreasi diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan data penunjang intern BPS (Ketenagakerjaan, Susenas, Sensus Ekonomi, Statistik Harga Konsumen, dan Survei-survei Khusus yang Dilakukan oleh Direktorat Neraca Produksi dan Direktorat Neraca Pengeluaran).

- **Kegiatan Jasa Lainnya**

Kegiatan ini berkategori S yang mencakup kegiatan dari keanggotaan organisasi, jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga, serta berbagai kegiatan jasa perorangan lainnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk Jasa Lainnya diperoleh dari perkalian antara masing-masing jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio NTB dengan output. Sedangkan untuk memperoleh output dan NTB atas dasar harga konstan menggunakan metode deflasi dimana deflatornya adalah IHK Umum.

Sumber data yang diperlukan berasal dari data penunjang intern BPS (Sensus Ekonomi, Subdit Statistik Demografi, Susenas, Statistik Harga Konsumen).

- **Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan**

Kegiatan ini berkategori T di KBLI 2009, mencakup kegiatan yang memanfaatkan Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga yan didalamnya

termauk jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya), dan Kegiatan Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan (didalamnya termasuk kegiatan pertanian, industri, penggalian, konstruksi, dan pengadaan air).

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ jasa pekerja domestik (pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, supir, dan sejenisnya) diperoleh dari perkalian antara pengeluaran perkapita untuk jasa pekerja domestik dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan NTB-nya sama dengan output yang dihasilkan karena konsumsi antara pekerja jasa domestik merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga majikan. Untuk kegiatan yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, (pertanian, industri, konstruksi, penggalian) output dan NTB berlaku diperoleh dengan hasil survei intern BPS (SKTIR). Sedangkan output pengadaan air diperoleh dengan pendekatan rumah tangga yang menggunakan pompa dan sumur, baik sumur terlindung maupun tidak terlindung. Sementara itu, output dan NTB atas dasar harga konstan, baik untuk kegiatan pekerja domestik maupun kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan sendiri oleh rumah tangga diperoleh dengan menggunakan metode deflasi dengan deflatornya laju IHK umum.

Sumber data kategori ini diperoleh dari intern BPS, yaitu, Susenas, Sensus Penduduk, Subdit PEK (Publikasi Statistik Air Bersih), dan Survei Khusus yang Dilakukam Direktorat Neraca Pengeluaran.

- **Kegiatan Badan Internasional dan Ekstra Internasional Lainnya**

Kelompok ini berkategori U yang mencakup kegiatan badan internasional, seperti PBB dan perwakilannya, Badan Regional dan lain-lain, termasuk The Internasional Moneter Fund, The World Bank, The World Customs Organization(WHO), the Organization for Economic Co-operation and Development(OECD), the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) dan lain-lain.

Output dan NTB berlaku diperoleh dengan pendekatan biaya yang didapatkan dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional

lainnya. Sementara, untuk output konstan diperoleh dengan metode deflasi dengan deflator laju IHK umum.

Sumber data diperoleh dari laporan keuangan badan internasional dan ekstra internasional lainnya yang berkantor pusat di Indonesia dan Statistik Harga Konsumen.

Tinjauan Ekonomi 3

Nilai PDRB Kabupaten Brebes atasdasar harga berlaku (adhb) tahun 2022 mencapai 53,77 triliun rupiah. Secara nominal, mengalami kenaikan sebesar 4,80 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai 48,97 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB adhb ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di hampir semua lapangan usahakecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang masih dipengaruhi adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, yaitu dari 33,53 triliun rupiah pada tahun 2021menjadi 35,41 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Kabupaten Brebes mengalami kenaikan produksi tanpa pengaruhinflasipadahampir semua lapangan usaha (kecuali pertambangan dan penggalian) sebesar 1,9 triliun rupiah.

3.1 Struktur Ekonomi

Peranan berbagai lapangan usaha dalam menghasilkan barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yangdiciptakan setiap lapangan usahamenggambarkan seberapa besar ketergantungan terhadap kemampuanproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Brebes didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi diatas 15 persen dalam perekonomian.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2022 dihasilkan olehlapangan usaha Pertanian, Kehutanan,dan Perikanan, yaitu 36,01 persen. Angka ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan di mana pada tahun 2021 peranan lapanganusaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencapai 36,51 persen. Selanjutnya kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan pada tahun 2022 sebesar 17,99 persen naik dibanding tahun 2021 (17,54%), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,90 persen lebih rendah dari tahun 2021 (16,08%).

Tabel 3. 1Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha / *Industry*		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,25	35,64	37,51	36,51	36,01
B	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,43	2,42	2,42	2,21
C	Industri Pengolahan	15,81	16,74	16,83	17,54	17,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
F	Konstruks	4,30	4,34	4,15	4,36	4,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,50	16,68	15,87	16,08	15,90
H	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,88	1,97	1,99	2,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,40	4,53	4,29	4,43	4,82
J	Informasi dan Komunikasi	3,39	3,58	3,92	3,92	3,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,83	1,80	1,78	1,81	1,80
L	Real Estat	1,11	1,10	1,09	1,08	1,03
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,31	0,29	0,29	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	2,00	1,96	1,84	1,76
P	Jasa Pendidikan	4,71	4,86	4,85	4,72	4,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,81	0,87	0,85	0,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,15	2,21	2,08	2,03	1,94
	Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Brebes

Dari ketiga lapangan usahadominan dalam perekonomian Kabupaten Brebes yaitu lapangan usahapertanian, kehutanan, dan perikananturun dari 36,51% (2021) menjadi 36,01% (2022); lapangan usaha industri pengolahan peranamnya meningkat dari17,54% (2021) menjadi 17,99% (2022), adapun lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dansepeda motor mengalami penurunan komposisi dari 16,08% (2021) menjadi 15,90% (2022).

Kontribusi sektor perdaganganbesar dan eceran, reparasi mobil dansepeda motor yang sempat naik pada tahun 2021, komposisinya menurunpada tahun 2022 menjadi 15,90 persen. Sementara itu lapangan usahapertanian, kehutanan, dan perikanan selama lima tahun terakhir komposisinya berfluktuasi pada range 35 - 40 persen.

3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakansalah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan riil barang dan jasa yang dihasilkan di suatuwilayah. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi mengukurperubahan PDRB atas dasar harga konstan pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan harga konstan 2010,nilai PDRB Kabupaten Brebes mengalami kenaikan yaitu dari 33,53triliun rupiah (2021) menjadi 35,41 triliun rupiah (2022) produksinya naik sekitar 1,88 triliun rupiah..

Kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal ataupun publik dalam rangka mencegah penyebaran pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan ekonomi utamanya lapangan usaha sekunder dan tersier. Melemahnya aktivitas pada kedua sektor ekonomi tesebut menjadi pemicu terjadinya konstraksi dalam pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 namun pada tahun 2022 kembali tumbuh positif sebesar 5,61 persen.

Beberapa lapangan usaha yang pada tahun 2021 mengalami kontraksi, namun pada tahun 2022 tumbuh positifadalah administrasi pemerintahan,pertahanan, dan jaminan sosial wajib, yaitu dari -0,54 persen menjadi 1,90 persen. Sedangkan lapangan usaha yanglain cenderung tumbuh positif, baikpada tahun 2021 maupun 2022.

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Brebes menurut Lapangan Usaha (Persen) 2018-2022

Lapangan Usaha/ *Industry*		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	0,64	3,91	0,35	3,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6,04	3,84	1,38	3,40	-3,12
C	Industri Pengolahan	5,27	12,98	-0,17	4,86	7,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	4,51	2,02	6,57	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,32	3,43	5,94	10,49
F	Konstruksi	6,08	5,20	-2,83	6,12	1,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	6,56	-4,75	3,79	4,50
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	8,91	-30,75	2,59	53,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	8,61	-4,82	5,94	14,88
J	Informasi dan Komunikasi	14,52	12,20	11,32	4,16	2,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	3,73	0,96	2,49	0,86
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,74	5,81	-0,51	1,80	3,75
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	10,05	11,07	-4,43	1,58	4,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	1,12	-0,92	-0,54	1,90
P	Jasa Pendidikan	8,58	7,97	-0,31	0,12	1,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	7,06	7,70	1,46	0,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,12	9,48	-4,89	0,63	1,72
Produk Domestik Regional Bruto		5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Brebes

3.1 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRBper kapita, yang merupakan hasil bagi antaranilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkannilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Brebes pada tahun 2022 sebesar 26,74 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan hargakonstan nilai PDRB per kapita Brebes tahun2022 sebesar 17,61 juta rupiah dengan angka pertumbuhan sebesar 5,61 persen.

Selama lima tahun terakhir nilai PDRB per kapita Brebes selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Padatahun 2020 angka PDRB per kapita mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumya. Angka pertumbuhannya pun minus. Namun, pada tahun 2021-2022 perekonomian perlahan membaik. Salah satunya ditunjukan dengan nilai PDRB per kapita yang mengalami peningkatan di tahun ini.

Tabel 3. 3 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Kabupaten Brebes 2018-2022

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2018	2019	2020	2021*	2022**
- ADHB	42.973	46.179	47.059	48.966	53.771
- ADHK	31.060	32.848	32.693	33.533	35.415
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	23.344	25.653	23.834	24.573	26.744
- ADHK	17.229	18.247	16.558	16.828	17.614
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61
Jumlah Penduduk (Ribu Orang)	1.803	1.809	1.979	1.993	2.011
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,38	0,35	9,38	0,70	0,90

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kab. Brebes

Pertumbuhan dan Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan setiap lapangan usaha periode 2018-2022.

4.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian; subkategori kehutanan dan penebangan kayu; dan subkategori perikanan. subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanianmeliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perburuan dan jasa pertanian. Kategori ini masih menjaditumpuan dalam penyerapan tenaga kerja.

Kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai19,36 triliun rupiah atau sebesar 36,01 persen. Subkategori pertanian,peternakan, perburuan dan jasa pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam menciptakan nilai tambah pada kategori ini, disusul oleh subkategori perikanan, dan terakhir subkategori kehutanan dan penebangan kayu.

Subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian memberikan kontribusi terhadapkategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 89,16 persen. Subkategori ini masih dirinci kembali, dimana sebesar 65,09 persen disumbang oleh subkategori tanaman hortikultura, disusul oleh subkategori tanaman pangan sebesar 14,31 persen, peternakansebesar 5,97 persen, jasa pertanian dan perburuan sebesar 2,41 persen, dantanaman perkebunan sebesar 1,38 persen.

Tabel 4. 1 Peranan Nilai Tambah Bruto (NTB) Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap NTB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian,	**88,75**	**88,62**	**88,93**	**88,97**	**89,16**
a. Tanaman Pangan	16,84	15,47	15,17	14,95	14,31
b. Tanaman Hortikultura	61,80	62,58	64,02	64,01	65,09
c. Perkebunan	1,51	1,55	1,44	1,44	1,38
d. Peternakan	6,13	6,48	5,87	6,10	5,97
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2,48	2,53	2,42	2,47	2,41
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	**4,50**	**4,36**	**4,15**	**4,19**	**3,88**
3 Perikanan	**6,75**	**7,03**	**6,92**	**6,85**	**6,96**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

4.2 Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha pertambangan danpenggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategoripertambangan minyak, gas, dan panas bumi, subkategori pertambangan batubara dan lignit, subkategori pertambangan bijih logam, dan subkategori pertambangan dan penggalian lainnya.

Kontribusi kategori pertambangandan penggalian terhadap pembentukanPDRB Kabupaten Brebes relatif rendah karena Brebes memang tidak memiliki bahan tambang maupun minyak bumi. Tetapi Kabupaten Brebes hanya memiliki subkategori pertambangan danpenggalian lainnya. Kontribusi subkategori ini dalam lima (5) tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2022 kontribusi subkategori ini mencapai 1,186 triliun rupiah atau sekitar 2,21 persen, menurun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 1,184 triliun rupiah atau sekitar 2,42 persen.

Tabel 4. 2 Peranan NTB Subkategori Pertambangan dan Penggalian Terhadap NTB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0	0	0	0	0
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	0	0	0	0	0
3. Pertambangan Bijih Logam	0	0	0	0	0
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	100	100	100	100	100
Pertambangan dan Penggalian	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

4.3 Industri Pengolahan

Lapangan usaha industri pengolahan mencakup 16 subkategori.Pada tahun 2022 lapangan usaha inimemberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebes atas dasar harga berlaku sebesar 9,67 triliun rupiah. Angka ini menyumbang sekitar 17,99persen dari total PDRB kabupaten.

Subkategori industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar terhadap pemerolehan PDRB Kabupaten Brebes pada lapangan usaha ini. Sedangkan subkategori industri batubara dan pengilangan migas, industri logam dasar, dan industri mesin dan perlengkapan ytdl tidak memberikankontribusi terhadap pemerolehan PDRB dikarenakan tidak ada aktifitas tersebut di Kabupaten Brebes.

Secara nominal, industri pengolahan bertambah 1,08 triliun rupiah, yaitu dari 8,59 triliun rupiah pada2021 menjadi 9,67 triliun rupiah pada 2022. Meskipun pertumbuhannya berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, namun pertumbuhannya cenderung, menguat pasca pandemi Covid-19. Padatahun 2022 laju pertumbuhan industripengolahan sebesar 7,36 persen atau menguat dibandingkan tahun 2021 yanghanya mencapai 4,86 persen.

Tabel 4. 3 Distribusi PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Kategori C (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Industri Makanan dan Minuman	82,37	79,38	81,86	82,01	83,19
3. Pengolahan Tembakau	1,06	1,00	0,97	0,85	0,78
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	2,58	5,54	4,99	5,09	5,01
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,41	0,90	0,86	0,87	0,87
6.Industri Kayu dan Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dan Bambu, Rotan dan Sejenisnya	7,19	6,37	4,72	4,56	3,96
7.Industri Kertas dan Barang dari Kertad, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	0,50	0,48	0,47	0,45	0,43
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	1,18	2,04	2,09	2,21	,12
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
10. Industri Barang Galian bukan Logam	2,20	1,99	1,90	1,85	1,72
11. Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Industri Barang dan Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	1,83	1,68	1,51	1,49	1,35
13. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Industri Alat Angkutan	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
15. Industri Furnitur	0,28	0,26	0,25	0,26	0,24
16. Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,29	0,26	0,25	0,25	0,24
Industri Pengolahan	100	100	100	100	100

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

4.4 Pengadaan Listrik dan Gas

Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas memberi kontribusi sebesar 0,03triliun rupiah atau sekitar 0,06 persenterhadap perekonomian Kabupaten Brebes pada tahun 2022. Dari kontribusitersebut, hampir seluruhnya (sebanyak94,21 persen) merupakan kontribusi darisubkategori ketenagalistrikan, sedangkan sisanya merupakan sumbangan dari subkategori pengadaan gas dan produksi es.

Selama lima tahun terakhir (2018- 2022), kategori pengadaan listrik dan gas mengalami rata-rata pertumbuhansebesar 4,54 persen. Pada periode yang sama subkategori ketenagalistrikan rata-rata tumbuh sebesar 4,72 persen, kecualipada tahun 2020 yang melambat sebesar2,28 persen. Sedangkan subkategori pengadaan gas dan produksi es mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Tabel 4. 4 Peranan NTB Subkategori Pengadaan Listrik Terhadap NTB Kategori Pengadaan Listrik dan Gas (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Ketenagalistrikan	93,66	93,62	93,82	93,78	94,21
2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	6,34	6,38	6,18	6,22	5,79
Pengadaan Listrik dan Gas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

4.5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan danpengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan, dll. Tidak termasuk kategori ini adalah pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian.

Peranan kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daurulang pada tahun 2022 relatif kecil hanyasekitar 31,84 miliar rupiah atau sebesar 0,06 persen. Selama lima tahun terakhir,rata-rata pertumbuhan kategori ini 5,83 persen, kecuali pada tahun 2020 yang hanya tumbuh 3,43 persen akibat pandemi Covid-19.

4.6 Konstruksi

Pada tahun 2022, kontribusi kategori konstruksi mencapai 2,32 triliunrupiah atau sebesar 4,31 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Brebes. Angka tersebut menurun biladibandingkan kontribusinya pada tahun 2021 yang mencapai 4,36 persen.

Pada periode 2018-2022, pertumbuhan kategori konstruksi cenderung melambat, apalagi pada tahun2020 kategori ini terkontraksi sebesar2,83 persen akibat adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2021, laju pertumbuhan konstruksi mencapai 6,12 persen, dan kemudian mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2022 yang hanya mampu tumbuh sebesar 1,98 persen.

4.7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, kategoriperdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang lebih dari 15 persen terhadap perekonomian Kabupaten Brebes. Pada tahun 2022, lapangan usaha ini memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebes senilai 8,55 triliun rupiah atau sekitar 15,90 persen. Sumbangan terbesar

berasal dari subkategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor, yaitu mencapai85,63 persen.

Laju pertumbuhan kategoriperdagangan besar dan eceran padatahun 2022 tumbuh sebesar 4,50 persen atau naik bila dibandingkan tahun 2021 yang hanya tumbuh 3,79 persen.

Tabel 4. 5 Peranan NTB Subkategori Perdagangan Terhadap NTB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Perdangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	14,57	14,52	13,81	14,84	14,37
2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	85,43	85,48	86,19	85,16	85,63
G. Perdangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

4.8 Transportasi dan Pergudangan

Pada kategori transportasi dan pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori, namun hanya 4 (empat) subkategori yang ada di KabupatenBrebes, yaitu angkutan rel; angkutan darat; angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan; pos dan kurir.

Kontribusi kategori ini pada tahun 2022 hanya mencapai 1,59 triliun rupiah atau sekitar 2,96 persen terhadap PDRB Kabupaten Brebes. Jikadibandingkan tahun 2021, kontribusikategori ini meningkat drastis seiring dengan kebijakan pemerintah yang telah mencabut aturan PPKM pasca pandemi covid-19, sehingga beberapa rute jalan protokol dibuka kembali untuk dilaluikendaraan bermotor. Moda angkutan darat masih menjadi sub kategori penyumbang terbesar (94,96%), disusul oleh angkutan rel (2,68%). Laju pertumbuhan pada kategori ini mencapai53,98 persen pada tahun 2022.

Tabel 4. 6 Peranan NTB Subkategori Transportasi Terhadap NTB Kategori Transportasi dan Pergudangan (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Angkutan Rel	3,26	3,44	2,79	2,69	2,68
2. Angkutan Darat	93,94	93,61	94,90	95,02	94,96
3. Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Penyebrangan	0,08	0,07	0,08	0,08	0,05
5. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. *Warehousing and Support Services for Transportaion, Postal, andcourier*	2,72	2,88	2,23	2,21	2,31
H. Transportasi dan Pergudangan	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

4.9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum memberi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Brebessebesar 2,59 triliun rupiah atau 4,82 persen pada tahun 2022. Sekitar 4,75persen dari PDRB total (atau 98,52 persen terhadap kategori) merupakan kontribusi dari subkategori penyediaan makanan dan minuman. Dan selebihnya merupakan kontribusi dari subkategori penyediaan akomodasi.

Tabel 4. 7 Peranan NTB Subkategori Penyediaan Akomodasi Terhadap NTB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Penyediaan Akomodasi	2,02	1,91	1,36	1,33	1,48
2. Penyediaan Makan Minum	97,98	98,09	98,64	98,67	98,52
Peyediaan Akomodasi dan Makan Minum	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Selama 5 tahun terakhir (2018- 2022), laju pertumbuhan kategori ini cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkansemakin meningkatnya jumlah usaha penyediaan makanan dan minuman, baikyang memiliki lokasi tetap maupunsecara berkeliling. Namun berbeda di tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 4,82 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Di mana subkategori penyediaan akomodasi yang mengalami kontraksi cukup

dalam mencapai -31,22 persen. Namun, pada tahun 2022, seiring pulihnya kondisi perekonomian di Kabupaten Brebes, kategori ini mulai bangkit kembali yang ditandai dengan pertumbuhan positifsebesar 14,88 persen.

4.10 Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi memiliki peranan penting sebagai penunjang aktivitas pada setiap kegiatan ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan informasi dan komunikasi sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori informasi dan komunikasi terhadap perekonomian Kabupaten Brebes selama lima tahun terakhir (2018-2022) relatif stabil, yaitu di atas 3 persen. Kategori informasi dan komunikasi juga merupakan salah satu kategori yang mampu tumbuh positif pada tahun 2022, yaitu mencapai 3,92 persen.

Namun demikian, laju pertumbuhan pada kategori inicenderung menurun, dimana mencapaititik tertinggi pada tahun 2018, yaitu 14,52 persen, kemudian terus menurun hingga tahun 2022 hanya tumbuh 2,94 percent.

Pertumbuhan kategori informasi dan komunikasi dipengaruhi tingginyapermintaan data internet secara keseluruhan. Hal ini selain disebabkan karena masih diberlakukannya kebijakan*work from home* (WFH) dan *school fromhome* (SCH) selama tahun 2021, juga didorong meningkatnya aktivitas online,seperti webinar, bermain game, dan belanja online.

4.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

Kontribusi kategori jasakeuangan dan asuransi terhadap total PDRB Kabupaten Brebes pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,97 triliun rupiah atau 1,80 persen. Kegiatan ekonomi pada kategori jasa keuangan dan asuransi didominasi oleh aktivitas pada subkategori jasa perantara keuangan. Pada periode 2018-2022, peranan subkategori ini berkisar 74-76 persen.Pada tahun 2022, kontribusi subkategoriini tercatat sebesar 75,57 persen.Kemudian diikuti subkategori jasakeuangan lainnya dengan kontribusi sekitar 23,10 persen.

Dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan kategori jasa keuangan dan asuransi cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2018, kategori ini mampu tumbuh sebesar 3,69 persen, kemudian naik 3,73 persen pada tahun 2019, namun kemudian melambat kembali menjadi 0,96 persen pada tahun2020, dan naik menjadi 2,49 persen pada 2021. Namun, pada 2022 pertumbuhan kategori ini hanya 0,86 persen. Beruntungnya di saat sebagian besar kategori mengalami kontraksi pada tahun 2020, pertumbuhan kategori jasa keuangan dan asuransi masih mampu mencatat pertumbuhan yang positif sebesar 0,96 persen. Melihat peran dan potensinya, sudah

selayaknya jika kategori jasa keuangan dan asuransi harus terus dikembangkan karena merupakan pendorong bagi sektor riilutamanya dalam pembiayaan investasi usaha.

Tabel 4. 8 Peranan NTB Subkategori Jasa Keuangan Terhadap NTB Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha	PDRB				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
1. Jasa Perantara Keuangan	74,43	72,61	72,86	74,56	75,57
2. Asuransi dan Dana Pensiun	1,34	1,41	1,45	1,39	1,32
3. Jasa Keuangan Lainnya	24,22	25,97	25,69	24,04	23,10
4. Jasa Penunjang Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Jasa Kuangan dan Asuransi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(*) Angka Sementara

(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Brebes

4.12 Real Estat

Seperti tahun-tahun sebelumnya kategori real estat memberikankontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Kabupaten Brebes dengan peranan sekitar 1,03-1,11 persen selama periode tahun 2018-2022. Pada tahun 2022, sumbangan pada kategori ini sebesar 0,56 triliun rupiah atau 1,03 persen.

Selama periode 2018-2022, laju pertumbuhan ekonomi pada kategori ini cenderung melambat, dari 1,11 persen pada tahun 2018 menjadi 1,03 persenpada tahun 2022. Salah satu faktor yangmempengaruhi perlambatan laju pertumbuhan kategori real estat (utamanya tahun 2018-2022) adalah situasi penjualan *property* yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahalpada periode tersebut situasi ekonomidalam kondisi cukup baik, dimana pertumbuhan ekonomi cukup stabil dan tingkat suku bunga yang terjaga rendah.Sayangnya, hantaman pandemi Covid- 19 selama 2020 menyebabkan kategori ini semakin tertekan. Beruntungnya aktivitas real estate kembali menggeliat di tahun 2022, yang menyebabkan pertumbuhan positif 3,75 persen.

4.13 Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori jasaperusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu 0,29-0,31persen selama tahun 2018-2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini terhadap pemerolehan PDRB Kabupaten Brebes relatif kecil dibandingkan kategori lainnya.

Laju pertumbuhan kategori jasa perusahaan terlihat sangat berfluktuatif. Pada tahun 2022, pertumbuhan kategori jasa perusahaan tercatat 4,62 persen ataumeningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,58 persen. Sementara itu, pada tahun 2020 pertumbuhan kategori ini terkontraksi 4,43 persen akibat hantaman pandemiCovid-19.

4.14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang bersifat pemerintahan dan pertahanan (militer), pada umumnyadilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2018-2022 kontribusi kategori ini menunjukkan sedikit penurunan yaitudari 2,07 persen pada tahun 2018 menjadi 1,76 persen pada tahun 2022. Sedangkan laju pertumbuhannya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1.90 persen.

4.15 Jasa Pendidikan

Pada periode 2018-2022,kontribusi kategori jasa pendidikan berkisar antara 4-5 persen terhadapperekonomian Kabupaten Brebes.Kategori jasa pendidikan pada 2022 menyumbang sebesar 2,36 triliun rupiah atau sekitar 4,39 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Brebes.Secara umum laju pertumbuhan kategorijasa pendidikan selama 5 tahun terakhir (2018-2022) berfluktuasi. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan kategori ini sebesar 8,58 persen, kemudian turun menjadi 1,46 persen pada tahun 2022. Sementara itu, laju pertumbuhan padakategori ini pernah mengalami kontraksihingga 0,31 persen pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

4.16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2022, kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Brebes sebesar 0,43 triliun rupiah (0,79 persen) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,66 persen. Selama tahun 2018-2022, kontribusi kategori ini berkisar 0,7-0,8 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Brebes.

Seperti halnya kategori informasidan komunikasi, pertumbuhan kategori ini pada tahun 2020 cukup tinggi mencapai 7,70 persen. Kemudian mengalai penurunan menjadi 1,46 persenpada 2021, lalu menurun lagi 0,66 persenpada 2022. Hal ini dikarenakan jasa kesehatan sangat dibutuhkan dalam rangka menangani pandemi Covid-19.

4.17 Jasa lainnya

Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Kabupaten Brebes tahun 2022 relatif kecil, yaitu 1,04 triliun rupiah atau 1,94 persen. Selama periode2018-2022 kontibusi lapangan usaha inicenderung menurun, dimana pada tahun2018 kontribusinya sebesar 2,15 persen,terus menurun hingga menyisakan 1,94 persen pada tahun 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16 007 281,69	16 456 003,58	17 650 953,93	17 877 527,45	**19 362 167,56**
B	Pertambangan dan Penggalian	1 066 482,31	1 121 278,18	1 140 038,46	1 184 340,13	**1 186 498,33**
C	Industri Pengolahan	6 793 532,74	7 728 527,22	7 921 583,29	8 588 388,46	**9 673 758,38**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	25 618,40	26 894,16	27 245,99	28 887,37	**30 246,69**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22 663,86	24 066,08	26 513,61	28 485,40	**31 843,80**
F	Konstruksi	1 849 764,06	2 004 719,54	1 954 898,51	2 137 189,36	**2 316 460,82**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7 092 755,80	7 701 758,73	7 469 224,92	7 874 441,45	**8 548 968,78**
H	Transportasi dan Pergudangan	1 194 879,88	1 327 640,35	927 618,56	975 190,81	**1 590 861,99**
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	1 892 782,58	2 091 586,43	2 018 261,13	2 169 407,11	**2 591 291,19**
J	Informasi dan Komunikasi	1 458 052,03	1 653 111,69	1 842 882,82	1 919 932,64	**1 981 397,95**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	786 731,52	829 221,96	837 583,46	888 288,20	**969 148,81**
L	Real Estate	475 798,53	509 735,46	512 168,89	527 213,94	**556 515,26**
M,N	Jasa Perusahaan	123 233,81	140 845,19	137 493,26	142 315,34	**155 207,37**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	888 958,00	924 795,53	924 203,86	903 316,52	**946 188,06**
P	Jasa Pendidikan	2 026 135,18	2 243 621,19	2 282 091,03	2 310 419,63	**2 360 302,95**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	343 287,67	374 690,49	408 050,08	418 023,48	**427 038,73**
R,S,T,U	Jasa lainnya	925 437,30	1 020 161,80	977 783,80	992 869,28	**1 043 160,83**
	Produk Domestik Regional Bruto	**42 973 395,36**	**46 178 657,58**	**47 058 595,60**	**48 966 236,57**	**53 771 057,50**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2022

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10 813 776,12	10 882 972,23	11 307 957,24	11 347 427,05	**11 752 524,77**
B	Pertambangan dan Penggalian	659 826,49	685 163,83	694 642,19	718 260,02	**695 877,50**
C	Industri Pengolahan	4 569 377,38	5 162 310,98	5 153 454,59	5 403 927,45	**5 801 825,18**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20 483,34	21 407,03	21 839,19	23 274,67	**24 261,33**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20 262,60	21 137,43	21 862,27	23 161,79	**25 592,25**
F	Konstruksi	1 304 087,62	1 371 900,18	1 333 058,34	1 414 641,51	**1 442 621,80**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5 757 567,32	6 135 364,78	5 843 853,87	6 065 231,55	**6 338 414,45**
H	Transportasi dan Pergudangan	1 016 640,40	1 107 177,24	766 678,04	786 564,09	**1 211 144,24**
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	1 475 360,27	1 602 327,88	1 525 171,77	1 615 731,28	**1 856 167,34**
J	Informasi dan Komunikasi	1 543 286,67	1 731 567,64	1 927 544,37	2 007 646,12	**2 066 733,31**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	535 878,00	555 875,28	561 233,04	575 206,95	**580 146,47**
L	Real Estate	406 533,90	430 153,52	427 947,39	435 639,26	**451 961,73**
M,N	Jasa Perusahaan	89 546,60	99 459,41	95 057,36	96 562,27	**101 020,81**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	614 850,83	621 749,78	616 051,29	612 724,61	**624 372,72**
P	Jasa Pendidikan	1 253 467,45	1 353 368,81	1 349 213,87	1 350 832,93	**1 370 518,01**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	250 370,12	268 046,25	288 685,81	292 900,62	**294 833,11**
R,S,T,U	Jasa lainnya	728 791,01	797 880,40	758 830,02	763 596,26	**776 744,33**
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**31 060 106,12**	**32 847 862,67**	**32 693 080,65**	**33 533 328,43**	**35 414 759,35**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,25	35,64	37,51	36,51	**36,01**
B	Pertambangan dan Penggalian	2,48	2,43	2,42	2,42	**2,21**
C	Industri Pengolahan	15,81	16,74	16,83	17,54	**17,99**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	**0,06**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06	**0,06**
F	Konstruksi	4,30	4,34	4,15	4,36	**4,31**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,50	16,68	15,87	16,08	**15,90**
H	Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,88	1,97	1,99	**2,96**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,40	4,53	4,29	4,43	**4,82**
J	Informasi dan Komunikasi	3,39	3,58	3,92	3,92	**3,68**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,83	1,80	1,78	1,81	**1,80**
L	Real Estate	1,11	1,10	1,09	1,08	**1,03**
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,31	0,29	0,29	**0,29**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,07	2,00	1,96	1,84	**1,76**
P	Jasa Pendidikan	4,71	4,86	4,85	4,72	**4,39**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,81	0,87	0,85	**0,79**
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,15	2,21	2,08	2,03	**1,94**
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Lampiran 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,82	33,13	34,59	33,84	**33,19**
B	Pertambangan dan Penggalian	2,12	2,09	2,12	2,14	**1,96**
C	Industri Pengolahan	14,71	15,72	15,76	16,12	**16,38**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	**0,07**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,07	0,07	**0,07**
F	Konstruksi	4,20	4,18	4,08	4,22	**4,07**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,54	18,68	17,87	18,09	**17,90**
H	Transportasi dan Pergudangan	3,27	3,37	2,35	2,35	**3,42**
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	4,75	4,88	4,67	4,82	**5,24**
J	Informasi dan Komunikasi	4,97	5,27	5,90	5,99	**5,84**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,69	1,72	1,72	**1,64**
L	Real Estate	1,31	1,31	1,31	1,30	**1,28**
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,30	0,29	0,29	**0,29**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,98	1,89	1,88	1,83	**1,76**
P	Jasa Pendidikan	4,04	4,12	4,13	4,03	**3,87**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,82	0,88	0,87	**0,83**
R,S, T,U	Jasa lainnya	2,35	2,43	2,32	2,28	**2,19**
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	**100,00**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	0,64	3,91	0,35	**3,57**
B	Pertambangan dan Penggalian	6,04	3,84	1,38	3,40	**-3,12**
C	Industri Pengolahan	5,27	12,98	-0,17	4,86	**7,36**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	4,51	2,02	6,57	**4,24**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,32	3,43	5,94	**10,49**
F	Konstruksi	6,08	5,20	-2,83	6,12	**1,98**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	6,56	-4,75	3,79	**4,50**
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	8,91	-30,75	2,59	**53,98**
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	8,61	-4,82	5,94	**14,88**
J	Informasi dan Komunikasi	14,52	12,20	11,32	4,16	**2,94**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	3,73	0,96	2,49	**0,86**
L	Real Estate	5,74	5,81	-0,51	1,80	**3,75**
M,N	Jasa Perusahaan	10,05	11,07	-4,43	1,58	**4,62**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	1,12	-0,92	-0,54	**1,90**
P	Jasa Pendidikan	8,58	7,97	-0,31	0,12	**1,46**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	7,06	7,70	1,46	**0,66**
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,12	9,48	-4,89	0,63	**1,72**
	Produk Domestik Regional Bruto	5,26	5,76	-0,47	2,57	**5,61**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Lampiran 6 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha, 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	148,03	151,21	156,09	157,55	**164,75**
B	Pertambangan dan Penggalian	161,63	163,65	164,12	164,89	**170,50**
C	Industri Pengolahan	148,68	149,71	153,71	158,93	**166,74**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	125,07	125,63	124,76	124,12	**124,67**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	111,85	113,86	121,28	122,98	**124,43**
F	Konstruksi	141,84	146,13	146,65	151,08	**160,57**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	123,19	125,53	127,81	129,83	**134,88**
H	Transportasi dan Pergudangan	117,53	119,91	120,99	123,98	**131,35**
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	128,29	130,53	132,33	134,27	**139,60**
J	Informasi dan Komunikasi	94,48	95,47	95,61	95,63	**95,87**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	146,81	149,17	149,24	154,43	**167,05**
L	Real Estate	117,04	118,50	119,68	121,02	**123,13**
M,N	Jasa Perusahaan	137,62	141,61	144,64	147,38	**153,64**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	144,58	148,74	150,02	147,43	**151,54**
P	Jasa Pendidikan	161,64	165,78	169,14	171,04	**172,22**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,11	139,79	141,35	142,72	**144,84**
R,S,T,U	Jasa lainnya	126,98	127,86	128,85	130,03	**134,30**
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138,36	140,58	143,94	146,02	**151,83**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumebr : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes

Lampiran 7 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018-2022

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**(6)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	2,15	3,23	0,93	**4,57**
B	Pertambangan dan Penggalian	4,19	1,25	0,29	0,47	**3,40**
C	Industri Pengolahan	2,98	0,70	2,67	3,39	**4,91**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	0,45	-0,70	-0,51	**0,45**
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,33	1,79	6,52	1,41	**1,17**
F	Konstruksi	4,42	3,02	0,36	3,02	**6,29**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,26	1,90	1,82	1,58	**3,89**
H	Transportasi dan Pergudangan	0,74	2,02	0,90	2,47	**5,95**
I	Penyediaan Akomodasi dan MakanMinum	1,05	1,75	1,38	1,46	**3,97**
J	Informasi dan Komunikasi	-0,08	1,05	0,15	0,02	**0,25**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,37	1,61	0,04	3,48	**8,17**
L	Real Estate	2,51	1,25	1,00	1,12	**1,75**
M,N	Jasa Perusahaan	2,30	2,90	2,14	1,89	**4,25**
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,43	2,88	0,86	-1,73	**2,79**
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,56	2,03	1,12	**0,69**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,97	1,95	1,12	0,97	**1,49**
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,50	0,69	0,78	0,91	**3,29**
	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,16	1,61	2,39	1,45	**3,98**

(*) Angka Sementara
(**) Angka Sangat Sementara

Sumebr :Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes